MUSEUMKAN DWIFUNGSI ABRI (TNI): SERUAN AKSI SERENTAK GAGALKAN REVISI UU TNI!

Jogja Memanggil

Situasi ekonomi hari ini tidak jauh beda seperti gelombang unjuk rasa pada tahun 1998 untuk mengakhiri kekuasaan jenderal Soeharto dan Orde Baru. Kemarin Bursa Efek Indonesia membekukan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berdampak pada pelemahan mata uang rupiah. Hal ini karena kebijakan sembrono rezim Prabowo-Gibran, seperti makan bergizi gratis bagi pelajar sekolah dasar dan menengah yang menambah utang besar dalam penggarapannya, kasus korupsi pertamina, efisiensi anggaran seluruh kementerian yang berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan sosial, BPI Danantara yang membuat duit rakyat diperjudikan oleh pemerintah, serta RUU TNI yang ingin memberikan tempat bagi para tentara berkuasa di jabatan sipil.

Situasi hari ini serupa dengan situasi kekuasaan Soeharto yang militeristik berakhir, meski masih menyisakan beban sejarah. Sebab, rezim militeristik karena dwifungsi ABRI itu melakukan pembunuhan dan pemenjaraan massal 3 juta anggota PKI, simpatisan PKI, dan tertuduh PKI itu belum tumbang sepenuhnya.

Rezim militeristik karena hadirnya dwifungsi ABRI itu terus-menerus membunuh rakyat melalui beragam peristiwa: Balibo, Santa Cruz, Talangsari, Rumoh Geudong, pemerkosaan perempuan Tionghoa, penculikan dan pembunuhan aktivis 1996-1998, dan masih banyak lagi tinta darah peristiwa.

Setidaknya ada enam agenda reformasi waktu itu: 1) Adili soeharto dan kroni-kroninya; 2) Amandemen UUD 1945 untuk memperkuat demokrasi; 3) Hapuskan dwifungsi ABRI; 4) Berikan otonomi daerah seluas-luasnya; 5) Tegakan supremasi hukum; dan 6) Ciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada poin hapuskan dwifungsi ABRI, hal ini diperlukan selain meminimalisir kesewenang-wenangan militer atas sipil yang salah satunya berujung pada kekerasan, juga meletakan posisi militer sebagaimana mestinya: di barak!

Keenam agenda reformasi pada akhirnya gagal, karena hanya Soeharto yang tumbang, tidak dengan sistem dan entitas yang memperkuat Orde Baru. Konglomerat dengan gurita bisnis, jenderal-jenderal TNI, kacung-kacung Soeharto bernama polisi yang kini berlaga preman saat ini, hingga anak-cucu-menantu Soeharto yang mereka semua kini berada di pemerintahan. Cara mereka bisa berkuasa adalah membuat sebanyak-banyaknya partai politik konglomerat dengan tidak ada ideologi yang dipertentangkan satu sama lain, dijalankan tanpa ada demokratisasi di dalam tubuh partai, menjalankan sebuah partai layaknya perusahaan keluarga, hingga orientasi partai yang sekadar menang lewat politik uang tanpa memperdulikan nasib dan perjuangan rakyat!

Perjuangan politik yang setengah-setengah dan bercorak liberal yang dilakukan aktivis 1998 juga membuat kebanyakan aktivis itu saat ini bermesraan dengan entitas-entitas yang memperkuat Orde Baru. Kita lihat situasi hari ini, para aktivis itu banyak yang masuk dalam partai politik yang dipimpin oleh kaki-tangan Soeharto dulu, mengeluarkan kebijakan tidak pro terhadap rakyat, dan kebijakan yang dibuat sekadar berpihak pada kepentingan konglomerat dan militer.

Setelah Prabowo Subianto berkuasa saat ini lewat cawe-cawe Jokowi, ia berupaya mengembalikan militer ke jabatan sipil. Hal tersebut memang tidak mengherankan, mengingat Prabowo Subianto merupakan menantu Soeharto, anak dari Soemitro yang merupakan ekonom liberal antek Amerika Serikat, mantan jenderal bertangan besi dan terlibat dalam penculikan dan pembunuhan aktivis 98, serta mantan menteri pertahanan yang gagal melaksanakan hapuskan dwifungsi ABRI karena menjadi pelopor *food estate* pada masa Jokowi. Melalui rekam jejak dan jaringan keluarganya, Prabowo Subianto merupakan momok utama dari upaya melahirkan kembali militer ke jabatan sipil.

RUU TNI, yang dibahas secara diam-diam di hotel mewah Jakarta, tidak memiliki naskah akademik yang komprehensif, tidak masuk prolegnas DPR 2025, tidak ada dalam RPJPM 2025-2029, hingga tidak ada partisipasi publik. Kita masih mengingat pula, pada 2023 Kepala Basarnas yang merupakan perwira aktif militer melakukan kasus korupsi senilai Rp 88,3 miliar untuk alat pendeteksi reruntuhan. Kasus itu akhirnya tidak ditangani dengan selesai, yang malahan KPK meminta maaf terhadap militer atas penetapan tersangka pada perwira aktif. RUU TNI jelas akan memperparah situasi semacam ini.

Hari ini perjuangan rakyat sudah jelas: Gagalkan RUU TNI dan turunkan Prabowo-Gibran sebagai biang kerok atas segala persoalan yang terjadi belakangan ini!

Jogja Memanggil juga menyerukan agar dwifungsi ABRI alias TNI dimasukkan ke dalam museum, baik itu museum nasional maupun TNI. Hal ini sebagai pengingat bahwa dwifungsi ABRI merupakan momok dan beban sejarah militer berkuasa di sipil, yang seharusnya dipelajari oleh siapapun agar militer tidak lagi menduduki jabatan sipil!

Yogyakarta, 19 Maret 2025